

# **PELAKSANAAN PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Habibi Pratama**

Pratamahabibi2@gmail.com

**Pembimbing : Mayarni**

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*This study aims to determine the Implementation of Community-Based Sanitation Programs in Pekanbaru City and to find out what factors are inhibiting the Implementation of Community-Based Sanitation Programs in Pekanbaru City. This research was conducted at the Department of Public Housing and Pekanbaru City Settlement Area and Lembah Damai Sub-District, Rumbai Pesisir district, Pekanbaru City. As for the theory used in this study is the theory of the program by Charles O. Jones in Suryana namely organizing, interpreting and applying or application. This research uses qualitative research with a descriptive approach using purposive sampling techniques for the community obtained through interviews, observation and documentation. research results show that, the implementation of the Department of Public Housing and Settlement Areas of the City of Pekanbaru on the implementation of community-based sanitation programs in the city of Pekanbaru has been running but has not been maximized. the inhibiting factor is from the community, because many people reject the community sanitation program and the lack of community knowledge about sanitation. it is better to increase socialization to the community so that the community can understand the sanitation-based program and no community refuses to implement the community-based sanitation program.*

**Keywords:** *Implementation, Sanitation, Program,*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan kota yang cepat secara langsung berimplikasi pada pembangunan infrastruktur dasar pelayanan publik. Kurangnya pelayanan prasarana lingkungan seperti infrastruktur air bersih dan sistem sanitasi, penyediaan rumah dan transportasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan kota, menjadi penyebab utama timbulnya berbagai masalah di kota-kota yang sedang berkembang. Kurang memadainya prasarana lingkungan pada suatu kawasan atau lingkungan permukiman di daerah tersebut, karena pada dasarnya keberadaan prasarana lingkungan merupakan kebutuhan yang paling penting secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi atau berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia. Artinya prasarana dasar dalam satu unit lingkungan adalah syarat bagi tercipta kenyamanan hunian.

Berdasarkan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator terkait dengan tugas-tugasnya dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi lingkungan. Dana Alokasi Khusus Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi, yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Bidang Sanitasi ini khususnya diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi masyarakat yang belum

mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Permasalahan sanitasi diperkotaan sekarang ini menjadi sangat penting. Sanitasi merupakan salah satu tantangan yang paling utama bagi negara berkembang ketika timbunan sampah, pengelolaan air limbah dan fungsi drainase yang sudah tidak dapat dikelola dan berfungsi dengan baik. Kondisi ini akan berdampak cukup luas, baik secara ekologis maupun sosial. Tidak memadainya sarana dan sanitasi akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan. Sebagai konsekuensinya pemerintah mendorong terpenuhinya kebutuhan tersebut meskipun hingga saat ini cakupan layanan sanitasi diperkotaan maupun di pedesaan belum memadai. Salah satu layanan sanitasi yang belum memadai adalah penanganan air limbah pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan pemukiman padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi diperkotaan.

Pelaksana atau yang terlibat dalam pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru dimulai dari tingkat nasional. Pada tingkat nasional yang menjadi pelaksananya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya diturunkan kepada tingkat daerah yang menjadi pelaksana adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru. Untuk melaksanakan Program Sanitasi berbasis masyarakat ini maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru menunjuk Bidang Kawasan Pemukiman yang mensosialisasikan secara langsung ke masyarakat dan dari masyarakat diajak dalam pelaksanaan Program Sanitasi ini dengan membentuk organisasi swadaya masyarakat melalui SK Kepala Dinas

Perumahan dan Pemukiman.

Program sanitasi mulai dilaksanakan pada tahun 2011 dalam UU Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Program sanitasi berbasis masyarakat merupakan salah satu program turunan dari pemerintah pusat yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Dana Alokasi Khusus Fisik. Terdapat juga di dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 tentang petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, program Sanitasi berbasis masyarakat di kota Pekanbaru beracuan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, di kota Pekanbaru merealisasikan program Sanitasi Berbasis Masyarakat berpedoman dengan peraturan yang ada, Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator terkait dengan tugas-tugasnya dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi lingkungan dan juga terdapat dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 272 Tahun 2018 tentang penetapan rencana kegiatan dana alokasi infrastruktur bidang sanitasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018.

Penelitian ini difokuskan pelaksanaan Program Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di kota Pekanbaru yakni pembangunan septic tank komunal yang baru dibangun di Kecamatan Rumbai Pesisir yakni di 6 lokasi yang bertepatan di kelurahan Lembah Damai

sedangkan saat ini terdapat 19 Kelurahan/Desa yang memiliki pemukiman kumuh yang mendapat SK Walikota Pekanbaru, 19 lokasi pemukiman kumuh yang mendapat SK Walikota Pekanbaru yakni terdapat di enam Kecamatan,

Saat ini masih banyak lagi daerah pemukiman kumuh Di kota Pekanbaru yang belum dicapai dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru. Pengaduan dari masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan program Sanitasi ini karena pelaksanaannya berbentuk Swakelola, Swakelola disini adalah Masyarakat yang melaporkan kondisi daerahnya dan Masyarakat juga yang melaksanakannya. Penulis tertarik dengan penelitian ini karena di Kota Pekanbaru memiliki 19 Lokasi pemukiman kumuh berdasarkan SK Walikota Pekanbaru dan pembangunan salah satu dari Program kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru yakni pembangunan septic tank komunal saat ini baru 6 unit dibangun di Kota Pekanbaru berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di kota Pekanbaru, penulis melihat dari Komunikasi antara Masyarakat dan Dinas terkait yang mempunyai tanggung jawab terhadap Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kota Pekanbaru.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Pelaksanaan Program

Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis  
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Khususnya pada Program Studi Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama. , serta menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang membahas permasalahan terkait implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru.

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1 Konsep Kebijakan

(Winarno, 2016) istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan

yang mempunyai maksud berbeda, namun kebijakan merupakan definisi yang menekankan tidak hanya pada yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut **William N. Dunn** dalam (Pasolong, 2014) mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut (Nugroho, 2017) kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis maupun fakta teknis. Kemudian menurut **Anderson** dalam (Indiahono, 2017) mendefenisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. **Kilpatrick** dalam (Asra, 2014) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarakat.

Menurut **W.I. Jenkins** dalam (Wahab, 2016:15), merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih berserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut **Abidin (2016:19)** kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk

memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. **Thomas R Dye** dalam (**Nugroho, 2017**) Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. **Bridgmen** dan **Davis** dalam (**Suharto, 2015**) mengatakan bahwa kebijakan publik “whatever government choose to do or not to do”, artinya kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

**Starling** dalam (**Tahir, 2015**) menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik. **Howlet** dan **M.Remesh** dalam (**Subarsono, 2011**) menyatakan bahwa proses kebijakan terdiri dari lima tahapan. Menurut **Koontz** dan **O'Donnel** dalam (**Tahir, 2015**) mendefinisikan kebijakan sebagai pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan. Sedangkan Menurut **James Anderson** (**Winarno, 2014**), “public policies are those developed by governmental bodies and official” (Kebijakan publik adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Dikutip dari **Friedrick** dalam (**Agustino, 2016**) Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

(**Winarno, 2014**) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sedangkan **Van meter** dan **Van Horn** dalam (**Winarno, 2016**) membatasi

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan secara sederhana menurut (**Agustino, 2016**) dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. **Grindle** dalam (**Winarno, 2016**) yang menurut pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkbage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Kemudian menurut **Ripley** dan **Franklin** dalam (**Winarno, 2016**) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

(**Purwanto & Sulistyastuti, 2015**) menyatakan implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. menurut **Mazmanian** dan **Sebastier** dalam (**Wahab, 2014**) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan.

(**Abidin, 2012**) mengemukakan bahwa proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama: faktor utama internal (kebijakan yang akan di

implementasikan) dan faktor utama eksternal (kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait). Serta menurut **(Kusumanegara, 2010)** mendefinisikan secara lebih luas implementasi kebijakan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Menurut **(Suharno, 2013)** Keberhasilan implementasi sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya: pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

Implementasi kebijakan menurut pendapat **(Nugroho, 2017)** makna implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. implementasi kebijakan menurut **Ripley** dan **Franklin** dalam **(Tahir, 2015)** mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif

Pengertian implementasi kebijakan oleh **Charles O. Jones** dalam **(Tahir, 2015)** mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan

3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

## 2.3 Implementasi Program

Menurut **Nakamura** dan **Smallwood** dalam **(Sujianto, 2008:152)** mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program:

1. Perspektif yang menilai keberhasilan pelaksanaan program dari aspek kepatuhan aparat birokrat bawahan kepada birokrat atasannya, atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandat/kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang.
2. Keberhasilan pelaksanaan program dari segi berfungsunya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan program dan tidak adanya konflik kedua perspektif ini mendefinsikan keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi proses.
3. Keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program.

Menurut **(Karding, 2008)**, program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan.

Menurut **Solihin (2009:71)** mengatakan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki durasi waktu tertentu serta dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Menurut **Umar (2005:15)**, program atau program-program disusun dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Program pada hakikatnya adalah kumpulan proyek, dalam hal ini proyek bisa disamakan dengan program.

**Jones** dalam **Arif Rohman (2009:**



**101-102)** menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut **Charles O. Jones** dalam **Siti Erna Latifi Suryana, (2009: 28)** ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program sasaran program **Haedar Akib dan Antonius Tarigan, (2000: 12).**

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-ha mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian.

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagai yang penyelenggara program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kota Pekanbaru dan di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sebagai pelaksana Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kota Pekanbaru, Kelurahan Lembah Damai sebagai lokasi penelitian untuk melihat kondisi dilapangan dimana Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru yang masih adanya permasalahan. Kelurahan Lembah damai berada di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru merupakan salah satu titik pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat dan pemilihan ini ditetapkan berdasarkan judul yang diangkat yaitu berhubungan dengan Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di

Kota Pekanbaru.

#### **3.2 Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Purposive Sampling. Dimana peneliti menentukan yang menjadi informan yaitu orang yang mewakili karakteristik populasi untuk memperoleh data untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Ada pun informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan PSU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
3. Staff Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
4. Masyarakat dan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Pelaksanaan Swakelola

#### **3.3 Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara dan observasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu meliputi Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kota Pekanbaru, data yang didapatkan langsung dari informan berupa informasi-informasi yang relevan dengan masalah yang sedang penulis teliti sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan. Yang penulis wawancarai dalam hal ini pelaksana program pada tingkat Kota yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, dan Pemerintah Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudah berbentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, dan penelitian terdahulu (jurnal). Data yang diperoleh dalam rangka mendukung dan mencari jawaban pertanyaan penelitian adalah Laporan hasil kegiatan program Sanitasi Berbasis masyarakat Tahun 2011-2018, Ketentuan pedoman teknis pelaksanaan DAK bidang sanitasi, Profil Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 21/PRT/M/2017 Tentang petunjuk operasional penyelenggaraan dana alokasi khusus infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 272 Tahun 2018 Tentang penetapan rencana kegiatan dana alokasi khusus infrastruktur bidang sanitasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang di perlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan dimana seorang penulis mengadakan

pengamatan langsung terhadap kegiatan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat mengenai Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kota Pekanbaru tepatnya di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir. Observasi dalam penelitian ini yang beroperasi dengan pengamatan meliputi melihat, merekam dan mencatat kejadian.

#### b. Wawancara

Wawancara penelitian dilakukan dengan menanyakan secara langsung dengan informan, yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru. Sehingga memudahkan penulis untuk lebih memahami pokok permasalahan yang akan di teliti.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Hal ini berkaitan dengan kegiatan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru yang berguna untuk mencari data sekunder dan primer. Dokumentasi yang peneliti sajikan ada pada lampiran dan peneliti dapat pada saat penelitian berlangsung.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

*Pertama*, Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data



untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scaning hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.

*Kedua*, Tahap selanjutnya, peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru, dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari kedalaman, penuturan informasi tersebut.

*Ketiga*, Setelah itu, peneliti lakukan dengan men-coding data. Yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Data tulisan tersebut berupa Laporan hasil kegiatan program sanitasi berbasis masyarakat tahun 2011-2018, ketentuan pedoman teknis pelaksanaan DAK bidang sanitasi, Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 tahun 2018, peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:21/PRT/M/2017, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun

2016, Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 272 Tahun 2018.

*Keempat*, Tahap selanjutnya, peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu teori Implementasi Kebijakan untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.

*Kelima*, Tahap terakhir peneliti memaknai data, dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru**

#### **4.1.1 Pengorganisasian**

Melihat dalam Pelaksanaan Program sanitasi Berbasis Masyarakat dalam Pengorganisasian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru bidang Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) yang bertanggung jawab dan menjalankan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru, dan juga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru merekrut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai Koordinator di lapangan dan memberi arahan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru menggunakan sistem Swakelola yakni masyarakat yang melaksanakan, maka dibentuk kelompok Swadaya Masyarakat untuk pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat di Kota Pekanbaru, pengorganisaian dalam program sanitasi berbasis masyarakat ini sudah bagus.

#### **4.1.2 Interpretasi**

Interpretasi yang dimaksud disini

yaitu menafsirkan program sanitasi berbasis Masyarakat ini menjadi rencana dan pengarah yang tepat agar dapat dilaksanakan dengan baik. Agar rencana dan pengarah dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab pada program tersebut. Kemudian, orang-orang yang bertanggung jawab pada program tersebut juga harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Serta dilihat pula apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Interpretasi pada penelitian ini mengenai pandangan program sanitasi berbasis Masyarakat, tujuan dan dampak, peran, dan tanggung jawab sudah sepenuhnya berhasil. Namun mengenai koordinasi bisa terbilang kurang antara pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dengan Masyarakat yang ada, masih terdapat kesalahan dalam pembangunan sehingga program kegiatan yang sudah dibangun menjadi masalah bagi masyarakat.

#### **4.1.3 Aplikasi (Penerapan)**

Aplikasi adalah suatu dimana peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan. Selain itu, sebelum melaksanakan suatu program juga diperlukan perencanaan program. Hal ini perlu dilakukan agar memudahkan untuk menentukan apa saja yang harus dikerjakan, serta lebih mudah untuk menjalankan program tersebut.

Dalam kajian penelitian ini, dilihat dari unsur komunikasi kepada Masyarakat sehingga banyak Masyarakat yang menolak dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat, pelaksanaan belum tercapai sesuai RPJM. Pelaksanaan kegiatan program sanitasi berbasis Masyarakat seperti pembangunan Septik Tank komunal yang sasarannya pemukiman kumuh yang mendapat SK Walikota Pekanbaru, Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru terdapat 19 lokasi dan pembangunan saat ini baru 6 unit.

### **5.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir**

#### **5.2.1 Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi program. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi program. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada implementor yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditafsirkan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu program.

Buruknya komunikasi antara pelaksana kegiatan akan menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman muncul apabila masing-masing individu memiliki pemahaman dan persepsi yang berbeda dan tidak mampu menyamakan persepsi masing-masing. Hal tersebut bisa saja karena yang saling berkomunikasi memiliki

latar belakang pemikiran yang berbeda dan bisa pula karena penyampaian atau bentuk pesan kurang tepat sehingga memunculkan persepsi yang berbeda.

### **5.2.2 Ketersediaan Lahan**

Ketersediaan lahan sangat penting dalam pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat di kota pekanbaru, apabila salah satu lokasi yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat dan tidak adanya lahan untuk dibangun maka tidak bisa dilaksanakan.

## **6. PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai Pelaksanaan Program sanitasi Berbasis masyarakat Di Kota Pekanbaru maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kota Pekanbaru masih belum optimal karena masih ada kesalahan spesifikasi pembangunan septic tank di Kelurahan Rumbai Pesisir sehingga menimbulkan keluhan dari Masyarakat terhadap pembangunan septic tank dari Program Sanitasi Berbasis Masyarakat, terdapat kurangnya komunikasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dengan Masyarakat sehingga pelaksanaan Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kota Pekanbaru terhambat Karena terjadinya penolakan dari Masyarakat Karena kurangnya komunikasi dalam Pelaksanaan Program Sanitasi

Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru dan juga tidak ketersediaan lahan dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Pekanbaru. .

2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan berdasarkan sosialisasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yakni penghambat dalam pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat yaitu kurangnya komunikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dengan Masyarakat, peran masyarakat dalam pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat ini sangat diperlukan dan juga berasal dari Masyarakat dimana kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Sanitasi yang baik dan kesadaran masyarakat bahwa program sanitasi Berbasis masyarakat, sangat bermanfaat untuk kebersihan lingkungan masyarakat, komunikasi yang baik sangat diperlukan. Ketersediaan lahan juga merupakan faktor penghambat terlaksananya program sanitasi berbasis masyarakat.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program sanitasi melihat spesifikasi pembangunan septic tank yang sudah ditentukan dalam pedoman DAK supaya tidak terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru memperbaiki komunikasi

terhadap masyarakat agar tidak terjadi lagi masyarakat yang menolak terhadap pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat karena kurangnya informasi tentang program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Asra, A. (2014). *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: IN MEDIA.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Karding. (2008). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang. *Pasca Sarjana UnDip*, 1–151.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (6th ed.). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Implementasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Rudy & E. Ariyanto, eds.). Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. (2008). *Sujianto, 2008. Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau. Pekanbaru: alaf riau.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Umar. (2005). *Umar, Husein. 2005. Evaluasi Kinerja Perusahaan (Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif, Kuantitatif, dan Modern)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*

(F. Hutari, ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Pertama). Jakarta: Kencana.

#### **Dokumen-dokumen:**

Laporan hasil kegiatan program Sanitasi Berbasis masyarakat Tahun 2011-2018  
Ketentuan pedoman teknis pelaksanaan DAK bidang sanitasi

Profil Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 21/PRT/M/2017 Tentang petunjuk operasional penyelenggaraan dana alokasi khusus infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru

Surat Keputusan (SK) Walikota

Pekanbaru Nomor 272 Tahun 2018 Tentang penetapan rencana kegiatan dana alokasi khusus infrastruktur bidang sanitasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018.

#### **Jurnal**

Fajar Ramadhan, 2016. *Strategi Sanitasi Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Tahun 2015*.

Adel Andriadi, 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir Tahun 2016-2017*.

Yessica Harry Violetha, 2017. *Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di Kampung Tenun RT 01 Kelurahan Tenun Samarinda*.

Nurhidayati Amelia, 2016. *Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*.